

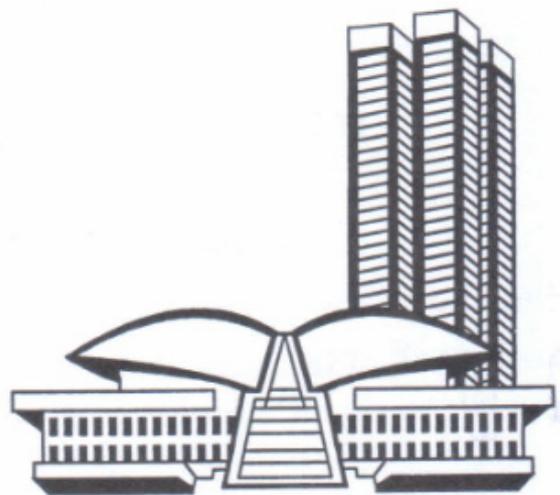
Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 23, No. 1, Maret 2018

ISSN 0853-9316

- **PELUANG DAN TANTANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENETAPAN TARIF KEPABEANAN *E-COMMERCE***
oleh: Daniel Sonatha Sinaga dan Edmira Rivani
- **HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA**
oleh: Lukman Adam
- **KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**
oleh: Samsul Arifin
- **PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE UNTUK MITIGASI BENCANA**
(Studi di Segara Anakan, Kab. Cilacap)
oleh: Hariyadi
- **PENGARUH BELANJA PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
oleh: Ari Mulianta Ginting



**Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI**

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 23, No. 1, Maret 2018

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● PELUANG DAN TANTANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENETAPAN TARIF KEPABEANAN <i>E-COMMERCE</i> <i>oleh: Daniel Sonatha Sinaga dan Edmira Rivani</i>	1-16
● HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA <i>oleh: Lukman Adam</i>	17-26
● KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA <i>oleh: Samsul Arifin</i>	27-42
● PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE UNTUK MITIGASI BENCANA (Studi di Segara Anakan, Kab. Cilacap) <i>oleh: Hariyadi</i>	43-61
● PENGARUH BELANJA PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	63-75

PENGANTAR REDAKSI

Memasuki tahun 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Maret 2018. Khusus edisi Maret ini artikel-artikel yang terbit pada Jurnal Kajian merupakan artikel-artikel dalam bidang ekonomi. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Peluang dan Tantangan Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan Penetapan Tarif Kepabeanan *E-Commerce*”, yang ditulis oleh Daniel Sonatha Sinaga dari Kementerian Keuangan dan Edmira Rivani dari Pusat Penelitian. Artikel ini mengulas mengenai *e-commerce*, menguraikan bagaimana perkembangannya, peluang, serta tantangan *e-commerce* di Indonesia. Sehingga, dapat dirumuskan kebijakan mengenai pemungutan pajak dan penetapan tarif kepabeanan *e-commerce*.

Artikel kedua adalah tentang “Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia”, yang ditulis oleh Lukman Adam dari Pusat Penelitian. Artikel ini menemukan bahwa hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional, sosialisasi/promosi terhadap kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan, dan juga prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor.

Tulisan ketiga membahas isu kesetaraan gender dengan judul “Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, yang ditulis oleh Samsul Arifin dari Universitas Tirtayasa Serang. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan kebijakan yang dapat dilakukan adalah dibidang pendidikan melalui program Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, sehingga diperlukan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Haryadi dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Untuk Mitigasi Bencana (Studi Di Segara Anakan, Kab. Cilacap)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan yang sifatnya lintas-kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, konteks sosio-kultural, dan perubahan rezim pengelolaan kawasan konservasi menjadikan sulitnya penyelesaian persoalan tersebut. Penguatan peran masyarakat, yakni keperluan kebijakan afirmatif dalam pengelolaan Segara Anakan sebagai kawasan konservasi, penguatan kelembagaan publik dan sosial, dan penetapan prioritas pengelolaannya secara lebih sinergis, serta percepatan pengembangan kawasan ekowisata dan penyadaran pentingnya konservasi ekosistem mangrove dapat menjadi satu alternatif yang dapat disasar.

Tulisan yang terakhir berjudul “Pengaruh Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang ditulis oleh Ari Mulyanta Ginting yang juga peneliti dari Pusat Penelitian. Belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, akan tetapi belanja sektor kesehatan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil ini maka sudah waktunya bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Maret 2018. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr, Ardi Adji, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Dr. YB. Suhartoko, dan Prof. Dr. Achmad Suryana, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2018

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Daniel Sonatha Sinaga (Kementerian Keuangan) dan Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENETAPAN TARIF KEPABEANAN *E-COMMERCE*

Kajian Vol. 23, No. 1, Tahun 2018, hlm. 1-16

Internet telah membantu perkembangan dunia digital secara radikal dalam memenuhi kebutuhan manusia atas barang dan jasa. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir kemajuan dunia digital telah melesat luar biasa dan mengejutkan. Revolusi dunia digital mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam menerobos rantai *supply-demand* dengan membuat efisiensi biaya, mempercepat informasi, memperkecil jarak kebutuhan dan permintaan, mempermudah transaksi dan memperoleh barang dan jasa serta berbagai terobosan inovasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi yang hadir dengan manfaat internet adalah *e-commerce*. Kemudahan yang tercipta dengan adanya *e-commerce* sangat menarik untuk ditelusuri. Kajian yang merupakan penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan data yang digunakan adalah hal-hal yang pokok dan penting dari berbagai macam sumber seperti Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, survei e-marketer; data Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta jurnal, working paper, atau hasil analisis mengenai perdagangan berbasis elektronik. Tujuan analisis ini adalah menjelaskan mengenai *e-commerce*, menguraikan bagaimana perkembangannya, peluang, serta tantangan *e-commerce* di Indonesia. Sehingga, dapat dirumuskan kebijakan mengenai pemungutan pajak dan penetapan tarif kepabeanan *e-commerce*. Perkembangan pasar *e-commerce* di Indonesia cukup pesat dengan potensi penerimaan pajak dan peluang usaha yang sangat besar, namun pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan untuk membuat keadaan yang kondusif bagi industri *e-commerce*. Hal yang penting dalam mengimplementasikan regulasi tersebut adalah strategi komunikasi yang tepat untuk menghindari resistensi pelaku usaha sebagai subyek pajak. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pelaku bisnis *e-commerce* dengan pemerintah dalam mengembangkan bisnis *e-commerce*, dapat dipastikan segala manfaat yang muncul dari industri *e-commerce* dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: internet, *e-commerce*, pajak, dunia digital, kepabeanan.

HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA

Kajian Vol. 23, No. 1, Tahun 2018, hlm. 17-26

Saat ini pengelolaan perikanan sedang memasuki babak baru. Di awal periode Presiden Joko Widodo, pengelolaan perikanan lebih banyak mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan utama ekspor dan bagaimana strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder yang digunakan terutama bersumber dari KKP, BPS, dan FAO, dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan, hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional, promosi kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebagai tambahan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor.

Kata kunci: ekspor perikanan, strategi ekspor, pengolahan hasil perikanan, Sistem Logistik Ikan Nasional, wilayah pengelolaan perikanan, perikanan berkelanjutan.

KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Kajian Vol. 23, No. 1, Tahun 2018, hlm. 27-42

Dalam isu MDGs, peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Kondisi diskriminasi gender di Indonesia masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Sehubungan fenomena banyaknya perempuan mengambil peran publik dikehidupan bermasyarakat esai ini membahas bagaimanakah kesetaraan gender dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Studi bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender dilihat dari besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa rasio angka harapan hidup perempuan terhadap laki-laki, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan di bidang pendidikan adalah program Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting. Program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah.

Kata kunci: kesetaraan gender, angka harapan hidup, partisipasi angkatan kerja, lama sekolah; pertumbuhan ekonomi; indonesia; data panel.

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
UNTUK MITIGASI BENCANA:**

Studi di Segara Anakan, Kab. Cilacap

Kajian Vol. 23, No. 1, Tahun 2018, hlm. 43-61

Ekosistem mangrove Segara Anakan mempunyai keragaman vegetasi yang tinggi. Namun demikian, luasan ekosistem ini terus menurun akibat sedimentasi dan intervensi manusia. Sejumlah kebijakan termasuk pengembangan aspek kelembagaan telah dilakukan pemerintah namun kurang mencapai sasaran. Lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan, terbatasnya program pemberdayaan, dan belum kuatnya kelembagaan khususnya yang bersifat sosial sehingga perambahan dan alih fungsi mangrove terus terjadi. Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan yang sifatnya lintas-kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, konteks sosio-kultural, dan perubahan rezim pengelolaan kawasan konservasi menjadikan sulitnya penyelesaian persoalan pengelolaan ekosistem mangrove tersebut. Alternatif kebijakan yang disarankan bagi peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove adalah penguatan peran masyarakat, yakni berupa kebijakan afirmatif dalam pengelolaan Segara Anakan ekosistem sebagai kawasan konservasi, penguatan kelembagaan publik dan sosial, penetapan prioritas pengelolaan secara lebih sinergis, percepatan pengembangan kawasan ekowisata, dan penyadaran pentingnya konservasi ekosistem kepada generasi muda di sekitar kawasan mangrove ini dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Kata kunci: ekosistem mangrove, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, mitigasi iklim dan bencana.

**PENGARUH BELANJA PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kajian Vol. 23, No. 1, Tahun 2018, hlm. 63-75

Desentralisasi fiskal telah membawa dampak kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan dana desentralisasi fiskal berdampak terhadap peningkatan belanja publik, khususnya belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil analisa regresi panel memperlihatkan bahwa belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, tetapi belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dana desentralisasi fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta.

